JISMAU: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi
Volume 1, Nomor 1, bulan Februari: halaman 50-59 e-ISSN:2620-8946

APLIKASI RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT

Application for Retribution for Fishery Business Permits Office of Maritime Affairs and Fisheries Province of NTT

[1]Ricky Laurent Yando Djaha, [2]Skolastika Siba Igon, [3]Yohanes Payong
[1,2,3]Program Studi Sistem Informasi
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang
Jln. Perintis Kemerdekaan 1, Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
e-mail: *rickydjaha@gmail.com*

Abstrak

Dinas kelautan dan perikanan provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur di bidang kelautan dan perikanan. Dinas kelautan dan perikanan provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan juga pelayanan retribusi izin usaha perikanan. Namun proses penyampaian informasi retribusi izin usaha perikanan tidak maksimal dan pengelolaan data belum berjalan dengan baik retribusi karena belum adanya sistem yang digunakan untuk memberikan informasi dan mengelola data retribusi sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait retribusi izin usaha perikanan dan proses pencarian data retribusi izin usaha perikanan yang efektif. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah manghasilkan sebuah aplikasi retribusi izin usaha perikanan berbasis website.Dalam prosedur penelitian ini terdapat metode yang digunakan yaitu metode *Waterfall*. Metode ini sering dinamakan siklus hidup klasik, dimana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut ke tahapan perencanaan, permodelan, konstruksi, serta penyerahan sistem ke para konsumen, yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Dengan adanya aplikasi retribusi izin usaha perikanan berbasis *website* diharapkan dapat mempermudah dinas kelautan dan perikanan provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelola data retribusi dan memberikan informasi kepada masyarakat.

Kata kunci: Aplikasi, Perikanan, Retribusi, Waterfall, Website.

Abstract

The Department of Marine Affairs and Fisheries of the province of East Nusa Tenggara is the technical implementing element of the provincial government of East Nusa Tenggara in the field of marine and fisheries. The Department of Marine Affairs and Fisheries of the Province of East Nusa Tenggara also provides services for retribution for fishery business permits. However, the process of submitting information on retribution for fisheries business permits is not optimal and data management has not been running properly because there is no system used to provide information and management of data levies, causing a lack of public knowledge regarding business license retribution fees and effective fisheries business permit retribution data processing. The goal to be achieved in this research is to produce an application for a website-based fishery business license levy. In this research procedure, there is a method used, namely the Waterfall method. This method often begins with the classical life cycle, where it describes a systematic and sequential approach to software development, starting with the specification of user requirements and then proceeding to the stages of planning, modeling, constructing, and defining customer systems, ending with support for customer systems. complete software generated. With the application of the site-based fishery business license retribution, it is hoped that it will make it easier for the marine and fisheries service of the province of East Nusa Tenggara to manage retribution data and provide information to the public.

Keywords: *Application, Fisheries, Retribution, Waterfall, Website.*

1. Pendahuluan

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi kepulauan dengan panjang garis pantai +5.700 km dan luas laut +200.000 km² serta memiliki keanaekaragaman flora dan fauna yang menawan dan perlu dieksplor serta dilestarikan. Kekayaan bahari seharusnya mampu menjadi penggerak perekonomian dan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur.Kemampuan pembiayaan daerah sangat ditentukan dari besar kecilnya penerimaan dan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu kewenangan pemerintah daerah saat ini adalah kewenangan untuk mengelola potensi daerah dalam rangka memenuhi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi: pajak daerah, retribusi daerah (termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum daerah), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga) dan lain-lain PAD yang sah Tenggara Timur (NTT) di bidang kelautan dan perikanan.

Dinas kelautan dan perikanan provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan juga pelayanan retribusi izin usaha perikanan. Namun proses penyampaian informasi retribusi izin usaha perikanan tidak maksimal dan pengelolaan data retribusi belum berjalan dengan baik karena belum adanya sistem yang digunakan untuk memberikan informasi dan mengelola data retribusi sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait retribusi izin usaha perikanan dan proses pencarian data retribusi izin usaha perikanan yang efektif. Berdasarkan permasalahan diatas proses memberikan informasi retribusi izin usaha perikanan belum berjalan dengan baik karena belum adanya sistem yang digunakan maka diharapkan dengan membuat aplikasi retribusi izin usaha perikanan diharapkan dapat mempermudah dinas kelautan dan perikanan provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelola data retribusi dan memberikan informasi kepada masyarakat.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Rahmadani, 2018) dengan judul "Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara Studi Kasus Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kab. Batu Bara"Tujuan dari penelitian ini adalah mencoba mengenal potensi daerah Kabupaten Batu Bara dalam upaya meningkatkan PAD melalui retribusi daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Batu Bara. Hasil penelitian ini yaitu Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara memiliki nilai t (hitung) sebesar 41,751 > t (tabel) sebesar 2,0345 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 berarti bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya nilai retribusi daerah lebih rendah dari tingkat signifikan sebesar 0,05 maka retribusi daerah berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Widyanti dan Zalwa, 2019) dengan judul "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Retribusi UPTD Konservasi Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan KKPD Pariaman" Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistim informasi akuntansi retribusi di UPTD Konservasi dan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan KKPD Pariaman.metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualititatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Setelah melakukan penelitian langsung di UPTD Konservasi dan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan KKPD Pariaman, kemudian penulis menganalisis dan mengevaluasi data yang diperoleh maka dapat diambil kesimpulan bahwa disetiap UPTD Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal sangat besar fungsinya terhadap suatu kemajuan dalam meningkatkan pendapatan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Yulianita, et.al. 2012) dengan judul "Pengembangan Aplikasi Sistem Perhitungn Retribusi Pelayanan Pasar Hewan Ambarawa Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Semarang"Pasar Hewan Ambarawa memiliki potensi untuk berkembang. Akan tetapi dalam operasionalnya baru memanfaatkan teknologi sebatas dalam pembuatan laporan dengan aplikasi Microsoft Office Excel, sedangkan penghitungan retribusi masih dilakukan secara manual. Maka diperlukan sebuah aplikasi sistem penghitungan retribusi pelayanan untuk Pasar Hewan Ambarawa sehingga diperoleh efisiensi waktu dan dokumentasi data. Dengan adanya dokumentasi data tersebut, dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan pasar hewan Ambarawa dan potensi wilayah Kabupaten Semarang, serta publikasi informasi kepada masyarakat mengenai Pasar Hewan Ambarawa. Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari pembuatan artikel ilmiah ini yaitu Penggunaan aplikasi SABPY merupakan solusi untuk dapat mengatasi masalah-masalah pada sistem penghitungan retribusi di Pasar Hewan Ambarawa. Aplikasi ini dapat membantu dalam input data, pengolahan, penyimpanan, serta pelaporan perolehan retribusi dan daftar hewan yang dapat membantu operasional kerja bagi pihak Dinas Peternakan danPerikanan Kabupaten Semarang.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Harsono, 2012) dengan judul "Perancangan Dan Pembuatan Sistem Informasi Pada Pasar Kebopolo Kota Magelang " Perkembangan teknologi yang begitu pesat dan cepat serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pengelolaan pasar merupakan suatu hal yang wajar. Salah satunya

menerapkan teknologi tersebut pada bagian retribusi.Kebanyakan dari pengelolaan retribusi masih bersifat umum yang sudah menggunakan computer. Namun tidak semua pasar mampu memanfaatkan adanya computer tersebut secara makasimal.Demikian juga dengan pengelolaan retribusi pada Pasar Kebonpolo Kota Magelang.Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengambul judul Perancangan Dan Pembuatan Sistem Informasi Retribusi Pada Pasar Kebo Polo Kota Magelang.Dari hasil analisis terhadap percobaan implementasi sistem yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai analisis dan desain sistem informasi penjualan ini, yaitu:

1. Dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan dalam melakukan pencatatan retribusi Pasar Kebonpolo Kota Magelang.
2. Dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan dalam pencarian data yang diinginkan.
3. Dengan adanya aplikasi ini juga, akan memudahkan data pelaporan retribusi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Rizal dan Kaonel 2014) dengan judul" Sistem Dan Prosedur Pembayaran Retribusi Perizinan Usaha (Studi pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang)" Pelaksanaan otonomi daerah akan terasa berat jika tidak didukung oleh kesiapan daerah terutama dari segi keuangan yang memadai. Karena dengan adanya otonomi daerah maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin dikurangi. Permasalahan yang dihadapi oleh setiap daerah kabupaten dalam proses otonomisasi tersebut terutama dari segi meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai rumah tangga daerahnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan Penelitian, Untuk menganalisis sistem dan prosedur pembayaran retribusi perizinan usaha di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang.Untuk menganalisis pengendalian intern atas sistem dan prosedur pembayaran retribusi perizinan usaha di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, Dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut : Sistem dan prosedur pembayaran retribusi perizinan usaha di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang sudah baik tetapi masih terdapat kekurangan dalam hal pelaksanaannya dikarenakan waktu bendahara penerimaan retribusi perizinan tutup tetapi jam kerja kantor masih belum selesai sehingga terdapat retribusi yang disetor keesokan harinya. Pengendalian intern atas sistem dan prosedur pembayaran retribusi perizinan usaha di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang

3. Tinjauan Pustaka

3.1 Retribusi izin usaha perikanan

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Sementara itu, retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarianlingkungan. Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. (Kementrian Keuangan Republik Indonasia. 2016).

Peraturan perikanan – retribusi 2020 peraturan daerah NO. 7, LD.2020/NO.007. Dalam direktorat utama pembinaan dan pengembangan hukum pemeriksaan keuangan negara peraturan daerah peraturan daerah (PERDA) tentang retribusi izin usaha perikanan. Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat bahwa dengan ditetapkannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengamanatkan pemungutan retribusi perizinan tertentu diatur dengan peraturan daerah, maka perlu disusun peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur tentang retribusi izin usaha perikanan; bahwa berdasarkan lampiran undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah huruf Y tentang pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan sub urusan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebelumnya, perlu menetapkan peraturan daerah tentang retribusi Izin usaha perikanan. Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2011. Materi yang diatur adalah: Batasan pengertlan dan Definsi, Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Sanksi Administrasi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan. (Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Peraturan Daerah. 2020).

3.2 Dinas kelautan dan perikanan provinsi NTT

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, pengelolaan ruang laut, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi NTT mewujudkan "NTT Bangkit Menuju Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di Jalan. Basuki Rahmat No.1 Naikolan, Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dinas Kelautan dan Perikanan Memiliki Visi dan Misi diantaranya: (RENSTRA, 2019).

Visi: Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Untuk mewujudkan visi dinas kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah :

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun fungsi dinas kelautan dan perikanan adalah melaksanakan:

1. Perumusan kebijakan teknis sektor kelautan dan perikanan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sektor kelautan danperikanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sektor kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasaranaserta rumah tangga;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DKP secara berjenjang, terkoordinasi, terdistribusi, efisien dan efektif, maka melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengatur uraian tugas dalam struktur organisasi. (RENSTRA, 2019)

3.3 Website

Website merupakan kumpulan halaman digital yang berisi informasi berupa teks, animasi, gambar, suara dan video atau gabungan dari semuanya yang terkoneksi oleh internet, sehingga dapat dilihat oleh seluruh siapapun yang terkoneksi jaringan internet. Jenis Kategori Website:

a. Web Statis
   Merupakan website yang mempunyai halaman yang tidak berubah. Perubahan suatu halaman dilakukan secara manual dengan mengedit code yang menjadi stuktur dari website tersebut.
b. Web Dinamis
   Merupakan website yang secara terstruktur diperuntukan untuk diupdate sesering mungkin. Biasanya disediakan halaman backend untuk melakukan perubahan konten dari website tersebut.
c. Web Interaktif
   Merupakan website yang berinteraksi antara penggunanya. Biasanya berupa forum diskusi maupun blog. Dimana adanya moderator sebagai pengatur alur diskusi.

Website merupakan istilah yang merujuk kepada suatu nama halaman web yang dapat diakses jika terkoneksi dengan internet. Untuk mengakses sebuah website, selain terkoneksi dengan internet, anda pun harus membukanya dalam sebuah aplikasi web browser (Sari, et.al. 2019).

3.4 PHP

PHP atau PHP Hypertext Prepocessor adalah sebuah bahasa script berbasis server (server-side) yang mampu mem-parsing kode php dari kode web dengan ekstensi .php, sehingga menghasilkan tampilan website yang dinamis di sisi client (browser). Dengan menambahkan skrip PHP, anda bisa menjadikan halaman HTML menjadi lebih

powerful, dinamis dan bisa dipakai sebagai aplikasi lengkap, misalnya web portal, e-learning, elibrary.

PHP pertama kali dikembangkan oleh seorang programmer bernama Rasmus Lerdrof pada tahun 1995. Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan menamakan PHP/FI sehingga banyak pemrograman yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. Danselanjutnya pada tahun 1997 perusahaan bernama Zend, mengembangkan intrepreter PHP tersebut menjadi lebih baik.

Kode PHP diproses melalui pemrosesan dari sisi server, makanya PHP disebut skrip server-side. Sehingga kode PHP tidak bisa diberikan langsung ketika ada permintaan dari client(browser).

Kode PHP dimasukkan ke dalam kode HTML dengan cara menyelipkannya di dalam kode HTML. Untuk membedakan kode PHP dengan kode HTML, di depan kode PHP tersebut diberi tag pembuka dan diakhir kode PHP diberi tag penutup.

Dengan adanya kode PHP, sebuah halaman web bisa melakukan banyak hal yang dinamis, seperti mengakses database, membuat gambar, membaca dan menulis file, dan sebagainya. Hasil pengolahan kode PHP akan dikembalikan lagi dalam bentuk kode HTML untuk ditampilkan di browser. (Sari, et.al. 2019).

3.5 Xampp

Aplikasi XAMPP adalah aplikasi yang membundle banyak aplikasi lain yang dibutuhkan dalam pengembangan web. Nama XAMPP merupakan singkatan dari aplikasi utama di dalamnya: X (huruf X berarti cross-platform, dimana aplikasi XAMPP tersedia untuk banyak Sistem Operasi), A (Apache web server), M (MySQL), P (PHP), dan P (Perl). Selain aplikasi tersebut, XAMPP juga menyertakan modul lain seperti OpenSSL dan phpMyAdmin (Haviludin, 2016)

3.6 Adobe Dreamweaver CS6

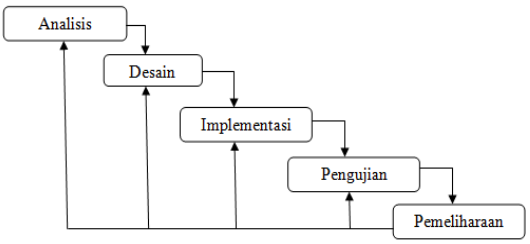
Adobe Dreamweaver CS6 adalah suatu perangkat lunak web editor keluaran Adobe Sistem yang digunakan untuk membangun dan mendesain suatu website dengan fitur - fitur yang menarik dan kemudahan dalam penggunaannya (Sadeli. 2013).

3.7 Visual Studio Code

Visual Studio Code merupakan editor kode sumber yang di buat dan diciptakan berbagai software seperti Microsoft untuk Windows, Linux, dan macOS. Fitur ini termasuk dukungan untuk debugging, penyorotan sintaks, penyelesaian kode cerdas, cuplikan, pemfaktoran ulang kode, dan Git yang disematkan. Pengguna dapat mengubah tema, pintasan keyboard, preferensi, dan menginstal saham yang menambahkan fitur tambahan. (Griya Media Nusantara, 2021).

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *Waterfall Model* atau biasa disebut *Classicc Life Cycle* adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun perangkat lunak.Dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1.Metode *SDLC Waterfall*

Gambar 1. Merupakan gambar dari konsep SDLC (*System Development Life Cycle*) *Waterfall*. Dalam pengembangannya metode *Waterfall* memiliki beberapa tahapan yang berurut yaitu: *requirement* (analisis kebutuhan), *design system* (desain sistem), *Coding* (pengkodean) dan *Testing* (pengujian), Penerapan Program, pemeliharaan. Tahapan tahapan dari metode *waterfall* adalah sebagai berikut:

1. Analisis kebutuhan

   Langkah pertama adalah mencari kebutuhan untuk membangun sebuah aplikasi. Pada penelitian ini analisis kebutuhan didapatkan melalui wawancara dan survei.
2. Desain

   Pada proses ini peneliti mulai mendesain user interface yang didalamnya terdapat kebutuhan aplikasi yang didapatkan pada metode sebelumnya.
3. Implementasi

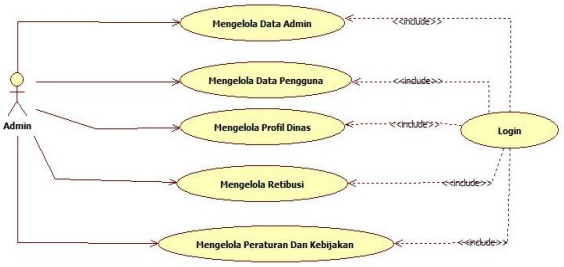
   Setelah mendesain user interface, langkah selanjutnya adalah melakukan pengkodingan. Proses koding ini bertujuan agar desain aplikasi tersebut dapat di mengerti oleh mesin, dalam hal ini biasa disebut dengan bahasa pemograman.
4. Pengujian

   Setelah proses pengkodingan selesai, aplikasi yang telah dibuat perlu dilakukan pengujian software. Tujuannya adalah agar aplikasi terbebas dari error. Hasil dari aplikasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan yang didapatkan pada analisis kebutuhan.

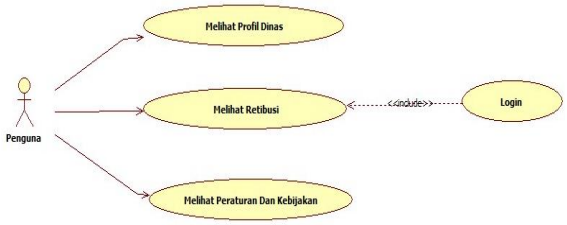
Dalam merancang system informasi ini menggunakan pendekatan *use case diagram* dan *class diagram*.

1. *Use case diagram*

   Use case diagram menggambarkan skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem dan merupakan hasil dari analisa kebutuhan yang telah dibuat sebelumnya. Dan pada sistem ini terdapat 2 aktor yaitu admin dan penguna.



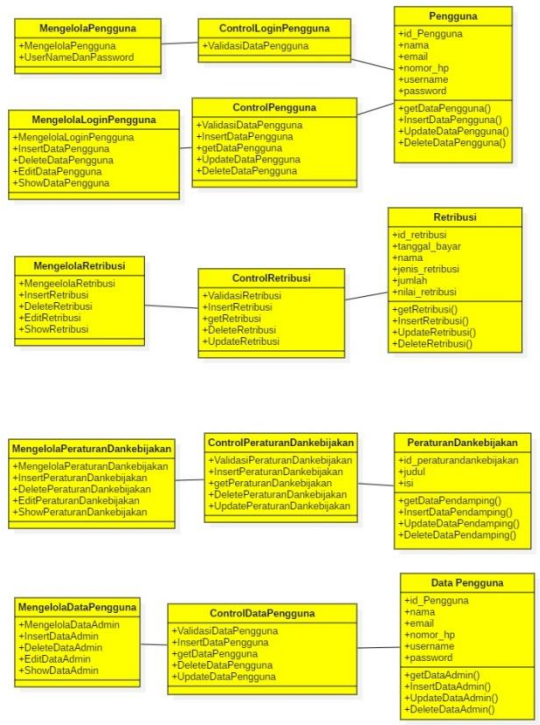
Gambar 2. *Use Case* Admin



Gambar 3. *Use Case*Pengguna

2. *Class diagram*

Class diagram adalah cara terbaik untuk menggambarkan struktur sistem secara rinci, menunjukkan atributnya, operasinya, serta hubungan antar-hubungannya.*class diagram* terdiri dari lebih dari satu kelas atau semua kelas yang dibuat untuk suatu sistem.



Gambar 6. *Class diagram*

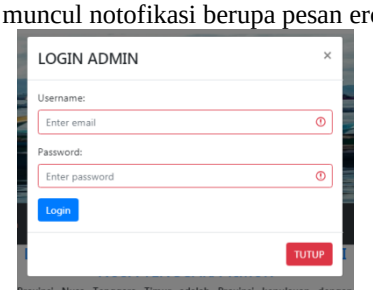
5. Implementasi Sistem

Aplikasi Retribusi Izin Usaha Perikanan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dirancang untuk menghasilkan suatu sistem yang mampu mempermudah dinas kelautan dan perikanan provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelola data retribusi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Sistem ini menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan MYSQL sebagai *database* servernya.

a. Proses Implementasi sistem.
   Tahapan implementasi merupakan tahapan setelah melakukan analisis dan perancangan sistem, dimana pada tahap ini sistem siap dijalankan untuk mengetahui hasil output sesuai perancangan sistem.
b. Antarmuka Sistem
   Berikut ini akan dibahas fungsi dan cara kerja setiap halaman dan menu menu yang dihasilkan oleh sistem yang dibuat.

1. Tampilan halaman *login* admin.

Pada halaman login terdapat form pengisian username dan juga password yang telah terdaftar sebelumnya dalam sistem. Panjang username dan password tidak ditentukan jumlahnya. Setelah mengisi form tersebut aktor akan mengklik tombol login untuk masuk kedalam sistem, dan apabila aktor memasukan username dan paswword salah makan akan ada muncul notofikasi berupa pesan erorr.



Gambar 1. Tampilan halaman *login* admin

2. Tampilan halaman utama admin

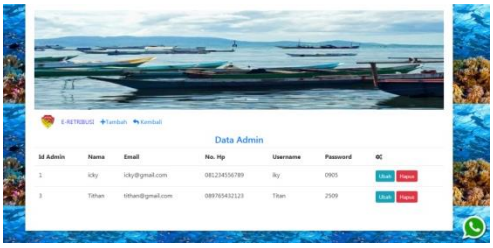
Halaman ini digunakan oleh admin setelah berhasil masuk (login) kedalam sistem. Halaman ini berisi semua data yang ada di dalam sistem ini.



Gambar 2. Tampilan halaman *utama* admin

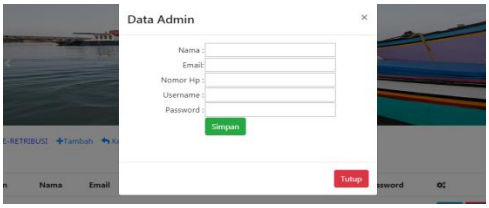
3. Tampilan halaman data admin

Halaman ini digunakan admin untuk mengelola data admin.



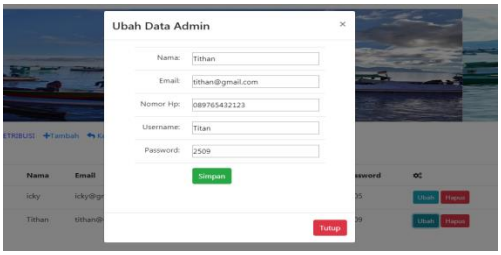
Gambar 3. Tampilan halaman data admin

4. Tampilan halaman tambah data admin
   Halaman ini digunakan admin untuk menambah data admin.



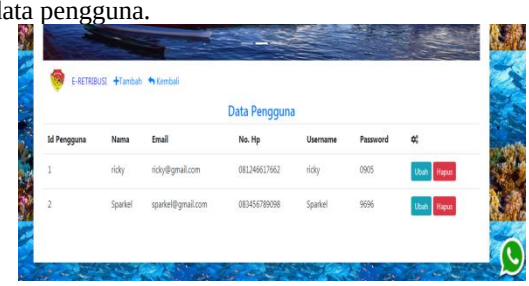
Gambar 4. Tampilan halaman tambah data admin.

5. Tampilan halaman ubah data admin
   Halaman ini digunakan admin untuk mengubah data admin.



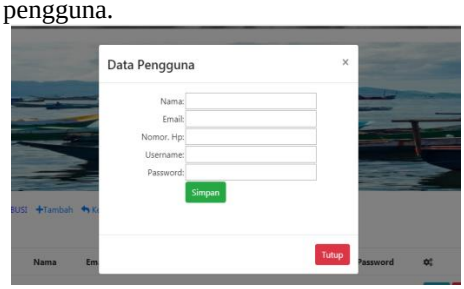
Gambar 5. Tampilan halaman ubah data admin

6. Tampilan halaman data pengguna
   Halaman ini digunakan admin untuk mengelola data pengguna.



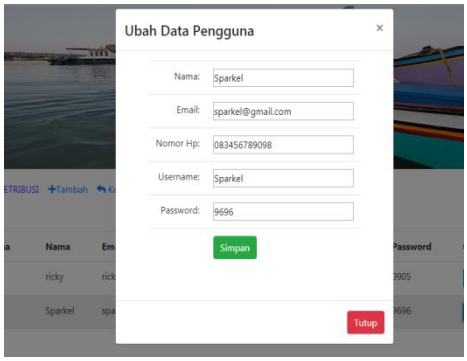
Gambar 6. Tampilan halaman data pengguna.

7. Tampilan halaman tambah data pengguna
   Halaman ini digunakan admin untuk menambah data pengguna.



Gambar 7. Tampilan halaman tambah data pengguna

8. Tampilan halaman ubah data pengguna
   Halaman ini digunakan admin untuk mengubah data pengguna.



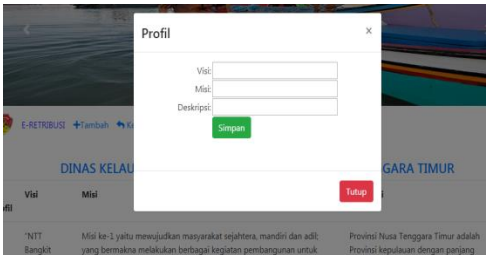
Gambar 8. Tampilan ubah data pengguna.

9. Tampilan halaman profil (admin)
   Halaman ini digunakan admin untuk mengelola profil.



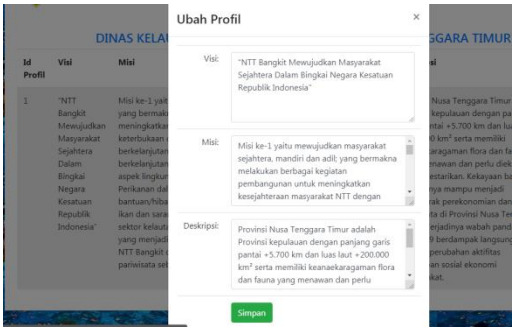
Gambar 9. Tampilan halaman profil (admin).

10. Tampilan halaman tambah profil (admin).
    Halaman ini digunakan admin untuk menambah profil.



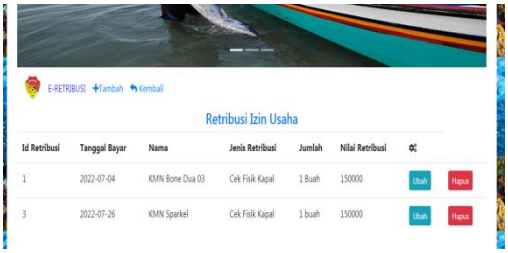
Gambar 10. Tampilan halaman tambah profil (admin).

11. Tampilan halaman ubah profil (admin).
    Halaman ini digunakan admin untuk mengubah profil.



Gambarb11. Tampilan halaman ubah profil (admin).

12. Tampilan halaman retribusi (admin)
    Halaman ini digunakan admin untuk mengelola data retribusi.



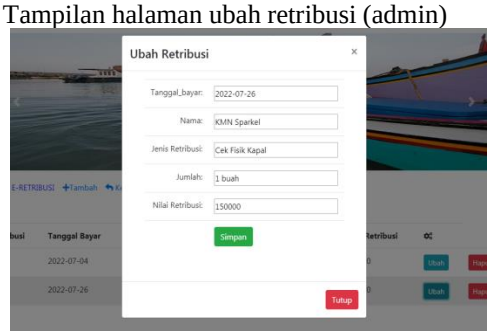
Gambar 12. Tampilan halaman data retribusi (admin).

13. Tampilan halaman tambah retribusi (admin)
Halaman ini digunakan admin untuk menambah retribusi.



Gambar 13. Tampilan halaman tambah retribusi (admin).

14. Tampilan halaman ubah retribusi (admin)



Gambar 14. Tampilan halaman ubah retribusi (admin).

15. Tampilan halaman peraturan dan kebijakan (admin)
Halaman ini digunakan admin untuk mengelola peraturan dan kebijakan.



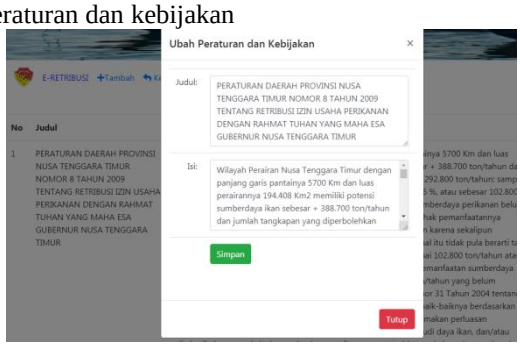
Gambar 15. Tampilan halaman peraturan dan kebijakan (admin).

16. Tampilan halaman tambah peraturan dan kebijakan (admin)
Halaman ini digunakan admin untuk menambah peraturan dan kebijakan



Gambar 16. Tampilan halaman tambah peraturan dan kebijakan (admin).

17. Tampilan halaman ubah peraturan dan kebijakan (admin)
Halaman ini digunakan admin untuk mengubah peraturan dan kebijakan



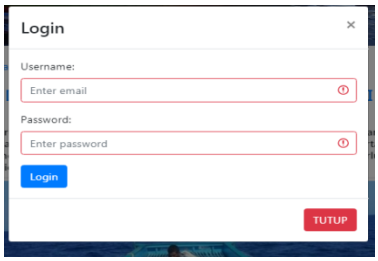
Gambar 17. Tampilan halaman ubah peraturan dan kebijakan (admin).

18. Tampilan halaman utama pengguna
Halaman ini merupakan tampilan utama pada aplikasi sebelum pengguna melakukan *login*.



Gambar 18. Tampilan halaman utama pengguna

19. Tampilan halaman *login* pengguna
Menampilkan halaman *login* bagi penguna yang akan mengakses halaman retribusi maka harus *login* terlebih dahulu.



Gambar 19. Tampilan halaman *login* pengguna.

20. Tampilan halaman utama pengguna setelah login
Menampilkan halaman utama pengguna setelah login.



Gambar 20. Tampilan halaman utama pengguna setelah *login* pengguna.

21. Tampilan halaman profil dinas.
Menampilkan halaman profil dinas.



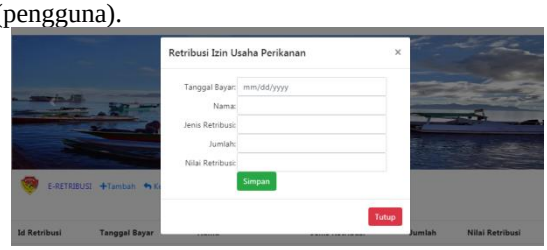
Gambar 21. Tampilan halaman profil dinas.

22. Tampilan halaman retribusi
Menampilkan halaman retribusi.



Gambar 22. Tampilan halaman retribusi.

23. Tampilan halaman tambah retribusi (pengguna).
Menampilakan halaman tambah retribusi (pengguna).



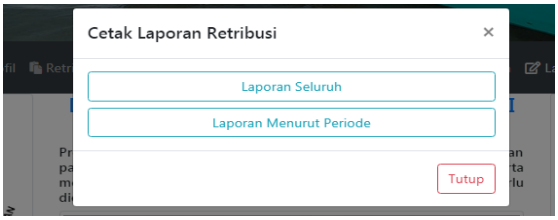
Gambar 23. Tampilan halaman tambah retribusi (pengguna).

24. Tampilan halaman peraturan dan kebijakan
Menampilkan halaman peraturan dan kebijakan.



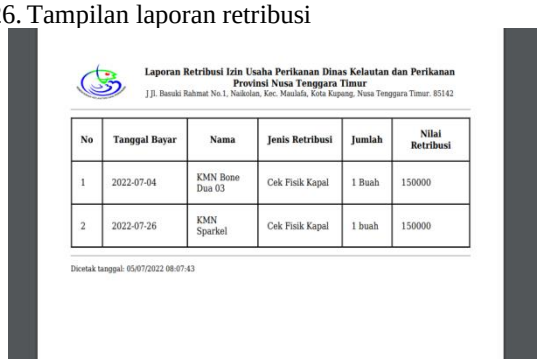
Gambar 51. Tampilan halaman peraturan dan kebijakan.

25. Tampilan menu laporan retribusi (admin)
Menu ini digunakan oleh admin untuk mencetak laporan. Laporan retribusi, bisa dicetak berdasarkan laporan keseluruhan dan laporan menurut periode tertentu.



Gambar 25. Tampilan menu laporan retribusi (admin).

26. Tampilan laporan retribusi



Gambar 26. Tampilan laporan retribusi.

6. Kesimpulan

Dengan dibuatnya aplikasi retribusi izin usaha perikanan ini dapat membantu dinas kelautan dan perikanan provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelola data retribusi dan memberikan informasi informasi kepada masyarakat

Referensi (Reference)

[1]Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 2020. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020. Gubernur Nusa Tenggara Timur – Kota Kupang. 25 Hal

[2]Griya M, N., 2021. Mengenal Visual Studio Code. [Internet].
[diakses 15 November 2021]. Tersedia pada: https://www.griyawebsite.com/mengenal-apa-itu-visualstudiocodedanbahasa-pemrograman/.

[3]Harsono,S, B., 2012. Perancangan Dan Pembuatan Sistem Informasi Pada Pasar Kebopolo Kota Magelang. Sistem Informasi. STIMIK AMIKOM Yogyakarta.

[4]Haviludin, Agus, T, H., dan Dwi R., 2016. Aplikasi Program PHP dan MySQL, Samarinda (ID), Mulawarman University PERSS.

[5]Kementrian Keuangan Republik Indonasia. 2016. Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Internet].{Diakses 28 november 2021]. Tersedia pada : https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-pajak-daerah-dan retribusi-daerah/

[6]Kurniawan D., 13, Juni 2020. Pengertian XAMPP Lengkap dengan Cara Menggunakannya. [Internet].{Diakses 9 februari 2022]. Tersedia pada https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-menggunakan-xampp.

[7]Muchtar. 2011. Spesifikasi use case. [Internet].{Diakses 25 Januari 2022]. Tersedia pada https://text id.123dok.com/document/eqo5l100y-diagram-use-case-spesifikasi-use case.html

[8]Rahmadani, A., 2018. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten batu Bara. Akuntansi Syariah. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

[9]RENSTRA-P DKP_280. 2019. Perubahan Rencana Strategis Kelautan Dan Perikanan. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi NTT - Kupang. 55 Hal.

[10]Rizal,N dan Kaonel, H, S., 2014. Sistem Dan Prosedur Pembayaran Retribusi Perizinan Usaha. pada Kantor Pelayanan Ter padu Kabupaten Lumajang. [Internet].[diakses 13 juni 2022]. Tersedia pada https://www.neliti.com/id/publications/36659/sistem-dan-prosedur-pembayaran-retribusi-perizinan-usaha-studi-pada-kantor-pelay/.

[11]Sadeli, M., 2013. Adobe Dreamweaver Cs6 Orang Awam. Palembang (ID). Maxikom.

[12]Sari, O,A., Ari. A., dan Sunarti., 2019. Web Programing. Yogyakarta (ID). Graha Ilmu.

[13]Setiawan, R., 2021. Squence diagram [Internet].{Diakses 26 Januari 2022]. Tersedia pada https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-sequence-diagram/

[14]Widyanti. R dan Zalwa. E, 2019. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Retribusi UPTD Konservasi Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan KKPD Pariaman. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

[15]Yulianita, S,. Djalal, E, R., dan Waito, S, P.,2012. Pengembangan Aplikasi Sistem Perhitungn Retribusi Pelayanan Pasar Hewan Ambarawa Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Semarang. Ilmu Komputer / informatika. Sains dan Matematika. Universitas Diponegoro.

[16]Zuliarso, E., 17 Oktober 2017. 648 Words [Internet].{Diakses 26 Januari 2022]. Tersedia pada https://bluewordiary.wordpress.com/2017/10/17/rancangan-antar-muka-interface/